Publish by: Universitas Muhammadiyah Bengkulu
https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/index
ISSN-ONLINE: 2774-9975
ISSN-OFLINE: 2775-3018
Vol. 6, No. 2, Oktober 2026 | Hal 362-375 |
Indexed by Sinta-5, Google Scholar, etc.

JUPANK **Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan**

ANALISIS NILAI KEWARGANEGARAAN DIGITAL PADA PEMASARAN SASIRANGAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS

Sulistiani[1], Putri Aulia Emha[2]
Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Banjarmasin
Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124
Email: Sulistiani@poliban.ac.id; putriauliaemha@poliban.ac.id.

Abstract

This study aims to analyze the digital citizenship values of people with disabilities in the marketing of local Sasirangan products. In today's digital era, social media is not only a place for interaction but also a virtual space for self-expression. Vulnerable groups are now starting to utilize social media to be able to participate actively and productively.. This study used a qualitative method with a case study of a group of Sasirangan tailors and sellers in Banjarmasin City. Data were collected through interviews, direct observation, and documentation of activities on Instagram and TikTok. The results show that social media is not only a tool for selling but also a place for vulnerable groups to build community solidarity and practice active citizenship. In these digital interactions, the values of mutual cooperation, responsibility, and media ethics are applied in the context of the local creative economy. These findings confirm that digital citizenship involves social, ethical, and cultural aspects that shape a strong digital citizen identity. This research is expected to provide input for the development of citizenship education that is in line with current developments and emphasizes the importance of empowering vulnerable groups in the digital space in a sustainable manner.

Keywords: Citizenship, Digital, Disabilities, Sasirangan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai kewarganegaraan digital penyandang disabilitas pada pemasaran produk lokal Sasirangan. Di era digital saat ini, media sosial bukan hanya tempat untuk berinteraksi, tetapi juga menjadi ruang maya untuk mengekspresikan diri. Kaum rentan kini mulai memanfaatkan media sosial agar bisa berpartisipasi secara aktif dan produktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada kelompok penjahit dan penjual Sasirangan di Kota Banjarmasin. Data dikumpulkan lewat wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi aktivitas di media sosial Instagram dan Tiktok. Hasilnya menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya alat untuk berjualan, tetapi juga tempat bagi kaum rentan untuk membangun solidaritas komunitas, dan menjalankan kewarganegaraan yang aktif. Dalam interaksi digital ini, nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab, dan etika bermedia diterapkan dalam konteks ekonomi kreatif lokal. Temuan ini menegaskan bahwa kewarganegaraan digital melibatkan aspek sosial, etis, dan budaya yang membentuk identitas warga digital yang kuat. Penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menekankan pentingnya pemberdayaan kaum rentan di ruang digital secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Digital, Disabilitas, Sasirangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap masyarakat dalam berinteraksi. Salah satu perubahan penting adalah munculnya ruang digital yang memungkinkan setiap orang untuk aktif di dunia maya. Fenomena ini dikenal sebagai kewarganegaraan digital, yaitu partisipasi digital yang mengutamakan nilai etika, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

Namun, tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama untuk menggunakan teknologi digital terkhusus dalam bidang pemasaran produk. Penyandang disabilitas, sebagai salah satu kelompok rentan, sering menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses teknologi dan kurangnya keterampilan digital. Hal ini membuat mereka sulit untuk berpartisipasi secara penuh di dunia digital.

Di Kota Banjarmasin, kain tradisional Sasirangan menjadi produk lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi. Media sosial seperti Instagram dan TikTok kini dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas di kota ini untuk memasarkan kain Sasirangan. Aktivitas ini bukan hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga menunjukkan keaktifan mereka dalam dunia digital. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan digital tercermin dalam pemasaran kain Sasirangan oleh penyandang disabilitas di Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini berupaya mengetahui tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam menjalankan peran sebagai warga digital yang aktif serta bagaimana hal ini memperkuat identitas sosial mereka.

Pemanfaatan media sosial oleh penyandang disabilitas dalam pemasaran kain Sasirangan mencerminkan transformasi digital yang inklusif di tingkat lokal. Melalui aktivitas daring, mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menegaskan keberadaan dan kontribusi kelompok difabel dalam ruang publik digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi dapat menjadi sarana pemberdayaan dan penguatan partisipasi sosial apabila digunakan secara kreatif dan produktif.

Lebih jauh, keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemasaran digital juga mengandung dimensi nilai kewarganegaraan digital, seperti tanggung jawab, etika komunikasi, serta kesadaran terhadap hak dan kewajiban di ruang digital. Melalui praktik pemasaran yang menghormati keaslian budaya dan memperhatikan etika dalam berinteraksi secara daring, mereka menunjukkan bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai kewarganegaraan digital dalam konteks ekonomi kreatif lokal. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kewarganegaraan digital bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran moral dan sosial dalam menggunakan teknologi.

Selain itu, fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana teknologi digital menjadi wahana bagi penyandang disabilitas untuk memperkuat identitas sosial dan budaya mereka. Pemasaran Sasirangan di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai ekspresi kebanggaan terhadap warisan budaya

Banjar. Dalam konteks ini, media digital berperan sebagai ruang kultural baru yang memungkinkan proses pelestarian budaya berlangsung secara adaptif dan partisipatif, sekaligus membuka peluang bagi difabel untuk diakui sebagai bagian dari pelaku budaya. Aktivitas pemasaran Sasirangan oleh penyandang disabilitas di Banjarmasin merepresentasikan praktik kewarganegaraan digital yang kontekstual dan transformatif. Melalui partisipasi aktif di ruang digital, mereka tidak hanya memperjuangkan kemandirian ekonomi, tetapi juga menegaskan eksistensi dan kesetaraan dalam masyarakat.

Namun demikian, partisipasi penyandang disabilitas dalam ekonomi digital masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi, keterampilan digital yang belum merata, serta hambatan sosial dan struktural menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pemasaran daring. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal menjadi krusial dalam menyediakan pelatihan serta infrastruktur yang inklusif bagi penyandang disabilitas agar dapat berdaya secara digital.

Penelitian sebelumnya banyak membahas kewarganegaraan digital dan pemberdayaan kelompok rentan, namun studi yang fokus pada peran penyandang disabilitas dalam pemasaran produk tradisional menggunakan media sosial masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan gambaran mendalam tentang praktik digital penyandang disabilitas dalam pemasaran Sasirangan.

Penelitian ini membatasi pembahasan pada pemasaran kain Sasirangan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Banjarmasin melalui media sosial. Fokus utamanya adalah pada nilai sosial dan moral dalam kewarganegaraan digital, bukan aspek teknis pemasaran. Menurut Khairunisa dan Sundawa (2023), pendidikan kewarganegaraan digital tidak hanya mengajarkan penguasaan teknologi, tetapi juga mengintegrasikan aspek etika, literasi, dan keamanan digital dalam pembentukan karakter warga negara yang sadar dan bertanggung jawab. Hal ini membantu membangun kesadaran sosial dan moral yang kuat dalam konteks digital, yang sangat relevan untuk memperkuat nilai-nilai dalam pemasaran digital oleh penyandang disabilitas. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana nilai kewarganegaraan digital terlihat dalam kegiatan pemasaran Sasirangan oleh penyandang disabilitas. Penelitian juga ingin mengidentifikasi faktor sosial yang mendukung dan menghambat keterlibatan mereka serta bagaimana hal ini membantu memperkuat rasa identitas dan solidaritas komunitas. Penelitian ini diharapkan dapat memebrikan pemahaman yang lebih

mendalam tentang bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan digital berperan dalam pemberdayaan kelompok rentan, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif di era digital, serta memberikan manfaat sebagai dasar pengembangan program pemberdayaan digital khusus bagi penyandang disabilitas, terutama dalam pemasaran produk budaya seperti kain Sasirangan. Dengan adanya program ini, penyandang disabilitas dapat meningkatkan keterampilan digital, membuka peluang ekonomi, dan memperkuat peran aktif mereka sebagai warga digital. Selain itu, hasil penelitian juga dapat memperkaya pemahaman pendidikan kewarganegaraan dengan perspektif baru yang menyoroti peran serta dan tantangan kelompok rentan di dunia digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, tepatnya di Rumah Disabilitas Borneo, yang menjadi salah satu pusat produksi kain tradisional Sasirangan, pada tahun 2025. Tempat ini dipilih karena aktivitas pemasaran Sasirangan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dan relevan dengan fokus penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan memahami nilai-nilai kewarganegaraan digital dalam konteks pemasaran Sasirangan oleh penyandang disabilitas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran mendalam terkait pengalaman, tantangan, dan praktik sosial digital yang berlangsung.

Penelitian ini menekankan pada upaya memahami fenomena secara keseluruhan. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aktivitas pemasaran kain Sasirangan oleh penyandang disabilitas. Wawancara bertujuan untuk menggali pemahaman, sikap, dan pengalaman para penyandang disabilitas dalam berperan sebagai warga digital. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui media sosial. Studi dokumentasi melengkapkan data dengan mempelajari materi pendukung seperti postingan media sosial. Pendekatan ini dipilih karena dapat memahami makna yang muncul dari pengalaman secara individu dan kelompok, serta menunjukkan nilai-nilai kewarganegaraan digital yang terlihat dari tindakan nyata mereka di dunia digital

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan para pelaku pemasaran Sasirangan yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Selain itu, Analisis dilakukan pada konten media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk memahami cara komunikasi, interaksi di dunia digital, dan bagaimana mereka

menunjukkan diri mereka. Dengan begitu, data yang didapat menggambarkan keadaan sosial digital yang asli dan sesuai dengan konteks.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas lapangan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen agar diperoleh gambaran yang komprehensif dan dapat dipercaya.

Keabsahan hasil penelitian juga diperkuat dengan melakukan pemeriksaan ulang kepada informan utama. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil dan penafsiran peneliti benar-benar sesuai dengan pengalaman dan pandangan para partisipan. Selain itu, peneliti juga terlibat langsung dalam kegiatan komunitas penyandang disabilitas, sehingga dapat memahami secara lebih mendalam situasi sosial dan budaya yang memengaruhi praktik pemasaran digital mereka. Dengan cara ini, hasil penelitian menjadi lebih akurat, relevan, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap hubungan antara teknologi digital, pemberdayaan sosial, dan nilai kewarganegaraan digital. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil ekonomi dari aktivitas pemasaran, tetapi juga menyoroti aspek moral, sosial, dan identitas yang melekat di dalamnya. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan studi tentang kewarganegaraan digital dan pemberdayaan kelompok rentan di era transformasi digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari penyandang disabilitas yang aktif memasarkan kain Sasirangan melalui media sosial di Banjarmasin. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemasaran Sasirangan, dan hasil penelitian terdahulu. Populasi penelitian mencakup seluruh penyandang disabilitas yang terlibat dalam komunitas Sasirangan yang berjumlah 8 orang.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Kriteria utama adalah penyandang disabilitas yang aktif dan memiliki akun media sosial.

Kajian pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sistematis untuk mendukung pemahaman terkait kewarganegaraan digital dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam pemasaran produk tradisional. Pertama, dilakukan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, pemberdayaan kelompok rentan, dan pemasaran melalui media sosial. Data juga dikumpulkan dari literatur yang mengulas kain Sasirangan sebagai produk budaya dan ekonomi lokal. Teknik analisis kajian pustaka yang digunakan adalah analisis isi. Proses ini meliputi identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi isi dari berbagai referensi yang telah dikumpulkan. Informasi yang relevan kemudian disusun secara sistematis untuk membangun kerangka teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian. Analisis ini juga dilakukan dengan membandingkan dan mengkritisi temuan dari berbagai sumber, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang topik yang diteliti.

Kriteria atau standar referensi yang dipilih mengutamakan sumber yang kredibel dan memiliki kualitas ilmiah baik, seperti jurnal dan buku. Referensi yang digunakan bersifat mutakhir dan relevan dengan konteks penelitian, terutama yang membahas digital citizenship, pemberdayaan penyandang disabilitas, media sosial, dan pemasaran produk tradisional.

Alur berpikir dalam kajian pustaka dimulai dari pemahaman umum tentang perkembangan teknologi digital dan konsep kewarganegaraan digital, kemudian mempersempit fokus pada peran media sosial dalam pemberdayaan kelompok rentan. Selanjutnya, kajian diarahkan ke konteks penyandang disabilitas dan bagaimana mereka menggunakan teknologi digital untuk pemasaran produk lokal, khususnya Sasirangan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat membangun dasar teori yang kokoh serta menemukan celah-celah penelitian sebelumnya yang perlu dilengkapi. Keseluruhan proses kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang jelas dan kuat bagi analisis data lapangan, sehingga hasil penelitian dapat dipahami dalam kerangka teori yang relevan dan kredibel. Langkah ini memastikan penelitian memiliki arah yang tepat serta memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pemberdayaan digital.

Selain itu, kajian pustaka berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang belum banyak dikaji oleh studi sebelumnya. Pemahaman terhadap keterbatasan riset terdahulu memungkinkan peneliti untuk menempatkan penelitian ini dalam posisi yang strategis, baik dalam memperluas teori maupun memperkuat praktik empiris. Dengan demikian, penelitian tidak sekadar mereplikasi temuan lama,

tetapi berupaya menghasilkan perspektif baru yang kontekstual dan inovatif. Kajian pustaka juga menjadi dasar dalam perumusan konsep, variabel, dan indikator penelitian. Melalui telaah teoritis yang komprehensif, peneliti dapat menyusun kerangka berpikir yang logis dan terstruktur, sehingga analisis data lapangan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Keberadaan kerangka konseptual ini penting untuk menjaga koherensi antara teori, metode, dan hasil penelitian.

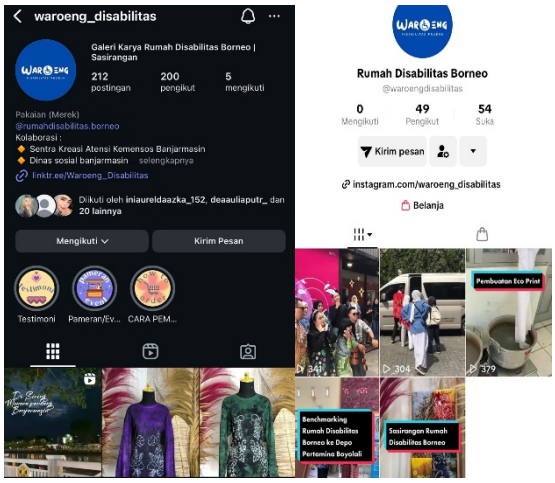
Lebih lanjut, kajian pustaka memperkuat argumentasi dalam pembahasan hasil penelitian. Dengan mengaitkan temuan empiris pada teori dan riset terdahulu, peneliti dapat menunjukkan relevansi, konfirmasi, atau bahkan perbedaan terhadap teori yang ada. Proses ini menjadikan penelitian bersifat analitis dan reflektif, sekaligus memperkaya diskursus ilmiah dalam bidang yang dikaji. Selain sebagai dasar konseptual, kajian pustaka juga berperan dalam menentukan pendekatan metodologis yang tepat. Pemahaman terhadap berbagai model penelitian terdahulu membantu peneliti menilai kelebihan dan keterbatasan setiap pendekatan, serta menyesuaikannya dengan konteks penelitian yang dilakukan. Hal ini memperkuat validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Kajian pustaka berkontribusi terhadap penguatan relevansi sosial dan akademik penelitian. Melalui integrasi teori dan temuan sebelumnya, penelitian dapat diposisikan dalam kerangka pembangunan ilmu dan praktik pemberdayaan digital yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memiliki nilai teoretis, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pengembangan masyarakat digital yang inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan digital tergambar pada pemasaran kain Sasirangan oleh penyandang disabilitas di Banjarmasin. Penelitian menemukan bahwa partisipasi penyandang disabilitas tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan aktivitas sosial dan moral yang aktif di dunia digital. Mereka memakai media sosial sebagai ruang untuk berinteraksi, membangun solidaritas dan menampilkan diri sebagai warga digital yang bertanggung jawab dan etis. Chen (2021) menyatakan bahwa kewarganegaraan digital adalah konsep multidimensi yang melibatkan sikap, pengetahuan, dan perilaku yang mendukung interaksi yang sehat dan bertanggung jawab di komunitas digital.

Temuan ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital yang dijalankan oleh penyandang disabilitas bukan hanya sekadar akses teknologi. Aktivitas mereka mampu menginternalisasi nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam pemasaran

Sasirangan. Ini sesuai dengan pandangan Castells (2012), yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan nilai kemanusiaan dalam masyarakat jaringan digital. Selain itu, temuan ini juga menguatkan teori Ribble (2011) yang menyatakan bahwa kewarganegaraan digital meliputi sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dan menghormati norma bersama di dunia maya. Penelitian ini mengaitkan hasilnya dengan studi sebelumnya tentang kesenjangan digital dan pemberdayaan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, seperti yang diutarakan Warschauer (2003) dan van Dijk (2020). Kendala akses dan kemampuan digital nyata adanya Goggin et al (2024), seperti halnya di Rumah Disabilitas Borneo, hanya 3 dari 8 anggota yang memiliki keterampilan digital terhadap pemasaran produk sasirangan, walaupun demikian Rumah Disabilitas Borneo memiliki media tersendiri untuk mengunggah dan memasarkan produk di akun mereka, yang dikerjakan langsung oleh pihak kepengurusan Rumah Disabilitas tersebut. Disini, kreativitas serta dukungan komunitas menjadi kunci untuk mengatasi hambatan. Konsep pemberdayaan berbasis komunitas terbukti efektif untuk memasukkan kelompok rentan dalam ruang digital secara inklusif.



Gambar 1. Akun Instagram dan Tiktok Rumah Dusabilitas Borneo

Dalam konteks Rumah Disabilitas Borneo, meskipun tidak semua anggota memiliki keterampilan digital secara langsung untuk memasarkan kain Sasirangan, adanya dukungan dari kepengurusan yang mengelola media sosial secara kolektif membuktikan pentingnya peran komunitas dalam menyediakan akses alternatif. sesuai dengan pernyataan Pangrazio (2021) bahwa literasi digital dan kewarganegaraan digital bersifat kolektif dan mendorong solidaritas sosial sebagai dasar dari keterlibatan dalam ranah digital. Kreativitas komunitas ini memungkinkan produk dapat terus dipromosikan dan dipasarkan secara digital tanpa harus bergantung pada keterampilan individu semata.

Selain itu, komunitas juga mengedepankan aspek solidaritas sosial, di mana anggota saling membantu dan berbagi pengetahuan agar semua dapat terlibat secara aktif dalam dunia digital. Hal ini menunjukkan penerapan nilai-nilai kewarganegaraan digital yang

inklusif, yakni memastikan partisipasi yang adil dan merata di dunia maya, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Leung (2018) menekankan bahwa untuk memastikan penyandang disabilitas bisa ikut berpartisipasi secara penuh dalam dunia digital, tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan teknologi saja. Dibutuhkan juga kebijakan dan dukungan sosial yang menghilangkan hambatan serta diskriminasi, sehingga mereka bisa menikmati hak dan kebebasan digital secara setara dan bermartabat.

Dengan begitu, hambatan seperti keterbatasan keterampilan dan komunikasi di ruang digital tidak menjadi hambatan utama karena adanya dukungan dari komunitas. Pernyataan van Toorn (2024) yakni meskipun seseorang memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital, hal itu belum tentu membuat mereka bisa sepenuhnya berpartisipasi dan mendapatkan hak yang sama di dunia digital. Pentingnya komunitas yang inklusif dalam dunia digital tidak bisa dianggap kurang berarti. Komunitas ini bukan hanya sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi, tetapi juga menjadi tempat di mana setiap anggota, termasuk penyandang disabilitas, mendapat bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan.

Komunitas yang terbuka ini juga membantu menghilangkan rasa takut dan ragu dalam menggunakan teknologi digital. Sering kali, penyandang disabilitas menghadapi tantangan seperti kurangnya informasi atau alat yang sesuai kebutuhan mereka. Melalui solidaritas sosial, anggota komunitas saling berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga semua bisa belajar bersama. Dengan begitu, hambatan-hambatan teknis yang mungkin sulit dihadapi seorang diri menjadi lebih ringan karena ada yang membantu.

Selain itu, komunitas yang berlandaskan pada nilai inklusivitas ini mampu membangun semangat kebersamaan dan hubungan yang kuat antar anggotanya. Rasa saling menghargai dan peduli tumbuh di dalam komunitas sehingga mereka yang awalnya merasa terpinggirkan bisa merasa diterima dan dihargai. Solidaritas ini membuat anggota komunitas semakin percaya diri dalam beraktivitas di dunia digital, karena mereka tahu bahwa ada dukungan di belakang mereka. Dalam dunia digital yang semakin berkembang pesat, komunitas inklusif berperan penting dalam menjaga agar tidak ada yang tertinggal. Kebijakan dan dukungan sosial saja tidak cukup jika tidak didukung oleh komunitas yang aktif dan peduli. Di sinilah komunitas berperan sebagai penghubung antara kebijakan dan pengalaman nyata di lapangan, membantu penyandang disabilitas mengatasi hambatan yang mereka hadapi sehari-hari.

Penting juga untuk memperhatikan bahwa kemampuan menggunakan teknologi digital

saja tidak menjamin partisipasi penuh dalam dunia digital. Seperti yang dikatakan van Toorn (2024), ada banyak faktor lain yang mempengaruhi. Faktor tersebut bisa berupa hambatan komunikasi, kurangnya aksesibilitas, atau diskriminasi yang masih terjadi di ruang digital. Komunitas inklusif membantu meminimalkan hambatan tersebut dengan memberikan pendidikan, alat bantu, dan dukungan moral bagi penyandang disabilitas. Komunitas juga memiliki peran dalam mengadvokasi hak-hak digital bagi penyandang disabilitas. Mereka bisa menjadi suara yang menyuarakan kebutuhan dan tantangan yang dialami oleh anggota komunitas kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintah atau perusahaan teknologi. Dengan cara ini, kebijakan dan produk digital dapat disesuaikan agar lebih ramah dan mudah diakses oleh semua orang, tanpa terkecuali.

Selanjutnya, komunitas menjembatani kesenjangan digital yang sering kali muncul, terutama di daerah-daerah terpencil atau bagi kelompok yang kurang mampu. Solidaritas sosial dalam komunitas memungkinkan adanya pertukaran sumber daya dan dukungan, seperti pelatihan, perangkat teknologi, atau informasi tentang layanan digital yang tersedia. Dengan demikian, penyandang disabilitas di berbagai tempat dapat menikmati manfaat digital secara merata.

Keterlibatan komunitas dalam dunia digital juga mendorong munculnya inovasi yang berfokus pada kebutuhan kelompok rentan. Anggota komunitas bisa saling berkolaborasi untuk menghasilkan solusi teknologi yang lebih inklusif, seperti aplikasi dengan fitur aksesibilitas khusus. Inovasi ini tentu akan sangat membantu memperkecil kesenjangan atau hambatan dalam berpartisipasi di dunia digital. Selain itu, loyalitas dan kebersamaan yang terjalin dalam komunitas meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas dalam menggunakan teknologi. Mereka tidak merasa sendiri menghadapi tantangan, melainkan punya teman dan pendukung yang siap membantu. Hal ini membantu mengurangi stres dan kecemasan yang biasa muncul saat menghadapi hal-hal baru dalam lingkungan digital.

Komunitas yang kuat dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas tentang pentingnya inklusivitas dan keadilan digital. Melalui aktivitas bersama, edukasi, dan kampanye yang dilakukan secara konsisten, kesadaran tentang kewarganegaraan digital yang adil dapat menyebar luas. Ini penting agar semua lapisan masyarakat dapat saling menghormati dan mendukung satu sama lain, terutama dalam menjalani kehidupan yang semakin terhubung secara digital.

Keberadaan media sosial yang dikelola bersama ini juga berfungsi sebagai ruang digital yang aman dan nyaman, yang memperkuat rasa kebersamaan dan

tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip kewarganegaraan digital yang menekankan etika, tanggung jawab, dan partisipasi aktif. Mossberger, Tolbert, dan McNeal (2007) menjelaskan bahwa digital citizenship menuntut partisipasi masyarakat yang bukan hanya aktif dalam mengakses teknologi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan moral, termasuk tanggung jawab dan etika digital yang memperkuat keterlibatan masyarakat secara positif dalam komunitas online. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga membangun nilai-nilai sosial dan moral yang memperkokoh keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemasaran digital kain Sasirangan secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran Sasirangan tidak hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga medium untuk memperkuat identitas sosial dan hubungan solidaritas antar anggota komunitas penyandang disabilitas. Hal ini memperluas perspektif bahwa ruang digital berfungsi sebagai arena sosial dan budaya yang mendukung pembangunan identitas kolektif, sebagaimana dikemukakan oleh Jenkins et al. (2009). Dari sudut pandang kritis, penelitian ini menegaskan bahwa teknologi digital bisa menjadi alat pemberdayaan yang kuat bagi kelompok yang selama ini tersisih, asalkan didukung dengan akses memadai dan pelatihan yang tepat. Ini memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkeadilan. Emejulu dan McGregor (2019) menyatakan bahwa kewarganegaraan digital harus bisa melihat ketidakadilan yang terjadi dalam penggunaan teknologi. Hal ini bertujuan agar teknologi bisa digunakan dengan cara yang adil, terutama untuk membantu kelompok yang selama ini kurang diperhatikan.

Dari sisi kebijakan, temuan ini memberikan implikasi penting. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan tersedianya akses teknologi yang mudah dan pelatihan keterampilan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Kebijakan inklusi digital harus dikuatkan agar mampu mengurangi kesenjangan yang ada dan memperluas partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat, terutama mereka yang rentan. Secara lebih luas, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kewarganegaraan digital tidak bisa terpisah dari konteks sosial dan budaya. Pendekatan yang mengutamakan nilai solidaritas, inklusivitas, dan kreativitas harus menjadi bagian inti dalam membangun ruang digital yang adil dan ramah bagi semua warga. Hal ini menggeser paradigma kewarganegaraan digital dari hanya aspek teknis menjadi konsep yang lebih holistik.

Secara keseluruhan, keberadaan komunitas inklusif adalah kunci untuk mewujudkan

dunia digital yang benar-benar adil, ramah, dan dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Solidaritas sosial, dukungan, dan kolaborasi yang terbangun di dalamnya menjadi fondasi agar setiap individu, terutama penyandang disabilitas, dapat menikmati hak dan kebebasan digital secara bermartabat dan setara.

Dibutuhkan perhatian pada struktur sosial dan kebijakan yang mendukung supaya tidak ada diskriminasi dan hambatan bagi penyandang disabilitas. Warschauer dan Matuchniak (2010) menegaskan bahwa kesetaraan digital harus dilihat secara menyeluruh, meliputi akses, penggunaan, dan hasil yang diperoleh, dengan memperhatikan faktor sosial dan struktural yang memengaruhi keterlibatan digital kelompok rentan. Dengan adanya dukungan dan lingkungan yang ramah, penyandang disabilitas bisa menikmati hak, kebebasan, dan ikut aktif dalam kegiatan sosial di dunia digital secara setara dan bermartabat.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Cakupan geografis terbatas pada Kota Banjarmasin dan fokus hanya pada pemasaran kain Sasirangan. Sampel yang digunakan juga tidak mewakili semua variasi kondisi penyandang disabilitas di Indonesia. Keterbatasan ini membatasi kemungkinan generalisasi hasil ke wilayah atau konteks lain. Pembatasan tersebut membuka peluang penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan wilayah dan jenis produk atau aktivitas digital yang diteliti.

Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan komparatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang praktik kewarganegaraan digital di kalangan penyandang disabilitas di berbagai daerah. Hal ini sejalan dengan peneltiian yang dilakukan oleh Thomas dan Kulasekara (2023) yang menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif dan cakupan yang lebih luas untuk memahami sepenuhnya tantangan inklusi digital penyandang disabilitas di berbagai konteks geografis dan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang aktivitas digital penyandang disabilitas, tetapi juga memperkaya wacana akademik dan praktik pemberdayaan digital. Studi ini mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen menciptakan ruang digital yang memberdayakan dan ramah bagi seluruh warga, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan sosial maupun teknologi.

KESIMPULAN

Pemasaran kain Sasirangan yang dilakukan penyandang disabilitas di Banjarmasin bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan digital yang kuat, seperti etika, tanggung jawab, kerjasama dan kepedulian sosial. Beberapa dari penyandang

disabilitas mampu menggunakan media sosial sebagai ruang partisipasi aktif yang mendukung pemasaran produk sasirangan mereka. Meskipun menghadapi keterbatasan keterampilan digital, mereka tetap menunjukkan kreativitas dan semangat tinggi dalam mengatasi hambatan tersebut.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa konsep kewarganegaraan digital harus dipandang secara holistik, tidak hanya dari sisi teknis pemanfaatan teknologi, melainkan juga dari aspek sosial dan moral. Nilai-nilai sosial seperti inklusivitas, solidaritas, dan rasa tanggung jawab menjadi bagian penting yang memperkuat peran penyandang disabilitas sebagai warga digital yang aktif dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi sarana pemberdayaan yang efektif bila disertai dukungan sosial yang memadai.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah, organisasi sosial, dan pemangku kepentingan lainnya mengembangkan program pemberdayaan digital yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Program tersebut harus mencakup peningkatan akses teknologi yang ramah disabilitas, pelatihan keterampilan digital yang sesuai, serta pembentukan jaringan dukungan komunitas yang kuat.

Selain itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk memperluas cakupan studi, baik secara geografis maupun konteks kegiatan digital yang diteliti. Studi-studi berikutnya dapat menggali lebih dalam berbagai variasi praktik kewarganegaraan digital dari berbagai kelompok rentan di berbagai daerah, sehingga dapat memperkaya teori dan praktik pemberdayaan digital. Dengan demikian, pemahaman dan pengembangan kewarganegaraan digital yang inklusif dan berkeadilan akan semakin kuat serta relevan dengan perkembangan masyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Castells, M. (2012). Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age. Polity Press.

Chen, L. L. (2021). Conceptualization and measurement of digital citizenship: An integrative review. Computers in Human Behavior, 121, Article 106781. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106781

Emejulu, A., & McGregor, C. (2019). Digital citizenship and social justice. Bloomsbury Academic.

Goggin, G., Hawkins, W., & Schokman, A. (2024). Disability and digital citizenship. Western Sydney University. https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/2053851/Disability_and_DigitalCitizenshipreportOct2024Gogginetal.pdf

Jenkins, H., et al. (2009). Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. MIT Press.

Khairunisa, W., Febrian, A., Sundawa, D., & Rahmat. (2024). Membangun keadaban digitalisasi warga negara Indonesia dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Jendela Pendidikan, 4(1), 1–8.

https://ejournal.jendelaedukasi.id/index.php/JJP/article/download/675/195

Leung, L. (2018). Disability, refugees and digital inclusion: New challenges for global citizenship. Journal of Refugee Studies, 31(2), 234-252.

Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2007). Digital citizenship: The Internet, society, and participation. MIT Press.

Pangrazio, L. (2021). Digital rights, digital citizenship and digital literacy. National Association for Educational Research Journal, 10(1), 1-15. https://doi.org/10.22242/naer.v10i1.4321

Ribble, M. (2011). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know (2nd ed.). International Society for Technology in Education.

Thomas, J., & Kulasekara, L. (2023). Australian digital inclusion index 2023: Disability and digital exclusion. Information Technology & People, 36(4), 1015-1035.

Van Dijk, J. A. G. M. (2020). The digital divide. Polity Press.

Van Toorn, G. (2024). Digital citizenship and disability in the COVID era. New Media & Society. https://doi.org/10.1177/14614448231201650